



LAPORAN KINERJA

**Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Triwulan II Tahun 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 21 Juli 2025
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Kendala dan Permasalahan	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Sasaran Kegiatan	10
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	10
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Analisis Capaian Kinerja	16
SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16
IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB	16
IKSK.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	18
IKSK.3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	20
IKSK.4 Indeks Pengelolaan SDM	22
IKSK.5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	23
IKSK.6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	25

IKSK.7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	26
IKSK.8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	29
IKSK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	30
IKSK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	32
IKSK.11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	33
IKSK.12 Persentase Layanan Perkantoran	35
IKSK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	36
IKSK.14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	38
IKSK.15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	40
IKSK.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	41
IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya.....	42
IKSK.18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	44
IKSK.19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	46
IKSK.20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	47
IKSK.21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	49
3.3. Akuntabilitas Keuangan	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Rekomendasi	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025	14
Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB	17
Tabel 3. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II Lingkup KKP	19
Tabel 4. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	20
Tabel 5. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	21
Tabel 6. Capaian Indeks Pengelolaan SDM.....	22
Tabel 7. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya.....	24
Tabel 8. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti... ..	25
Tabel 9. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	28
Tabel 10. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	29
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya.....	32
Tabel 12. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	33
Tabel 13. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	34
Tabel 14. Capaian Persentase Layanan Perkantoran.....	35
Tabel 15. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya.....	38
Tabel 16. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	39
Tabel 17. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya.....	40
Tabel 18. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya ...	42
Tabel 19. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	43

Tabel 20. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	45
Tabel 21. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	47
Tabel 22. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya.....	48
Tabel 23. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya	4
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	4
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	6
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum.....	7
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025.....	11
Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB Triwulan II Tahun 2025	13
Gambar 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Lingkup KKP	31
Gambar 9. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	37
Gambar 10. Perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan SIRUP Triwulan II Lingkup KKP.....	45
Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2025	51
Gambar 12. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2024	51

LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja (PK) Awal Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu April sampai Juni Tahun 2025 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama triwulan II tahun 2025.

Pada periode triwulan II tahun 2025, capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya cukup baik yakni sebesar 116,31 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode triwulan II tahun 2025.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Dari 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, terdapat 7 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan pada Periode Triwulan II Tahun 2025, yaitu :

- 1) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 74 (indeks), dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 82,24 (indeks) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 111,14% pada triwulan II;
- 2) Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 40 (persen), dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 100 (persen) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 250% pada triwulan II;
- 3) Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 30 (persen), dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 68,75 (persen) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 229,17% pada triwulan II;
- 4) Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 86 (persen), dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 100 (persen) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 116,28% pada triwulan II;
- 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85 (nilai),

- dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 97,11 (nilai) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 114,25% pada triwulan II;
- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85 (persen), dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 94,12 (persen) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 110,73% pada triwulan II;
 - 7) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 76 (persen), dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 99,29 (persen) dari target triwulan II dan persentase capaian senilai 130,65% pada triwulan II;

Sementara itu, 14 Indikator Kinerja belum dapat dihitung karena pada Periode triwulan II Tahun 2025 belum ditargetkan untuk pencapaiannya atau Indikator tersebut dihitung pencapaiannya secara tahunan atau semesteran.

Terlihat dari capaian target triwulan II terjadi peningkatan kinerja dari beberapa indikator yang menandakan kemajuan positif dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditandai dengan tercapaian target indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025. Diharapkan pada Indikator Kinerja yang belum dapat dihitung maupun yang sudah dilakukan perhitungannya pada triwulan II agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan kerja keras untuk dapat mengoptimalkan pencapaian pada sasaran kegiatan. Dengan demikian, diharapkan pada periode triwulan selanjutnya dapat mencapai atau bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan menjadi lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

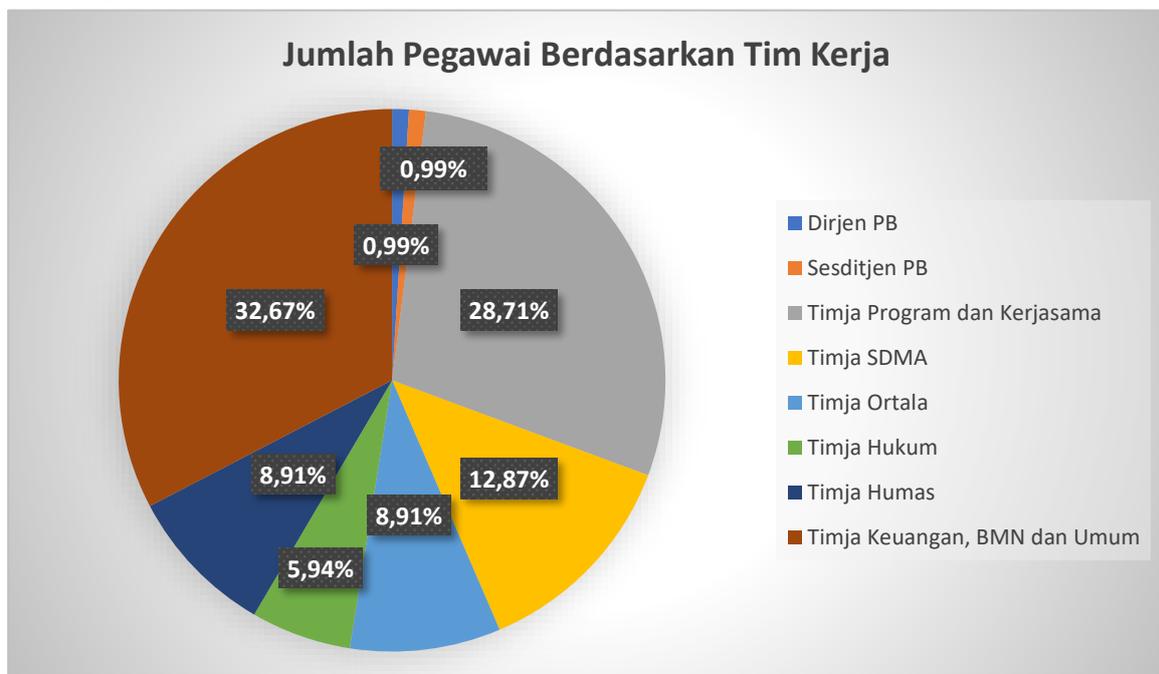
3. Fungsi

Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

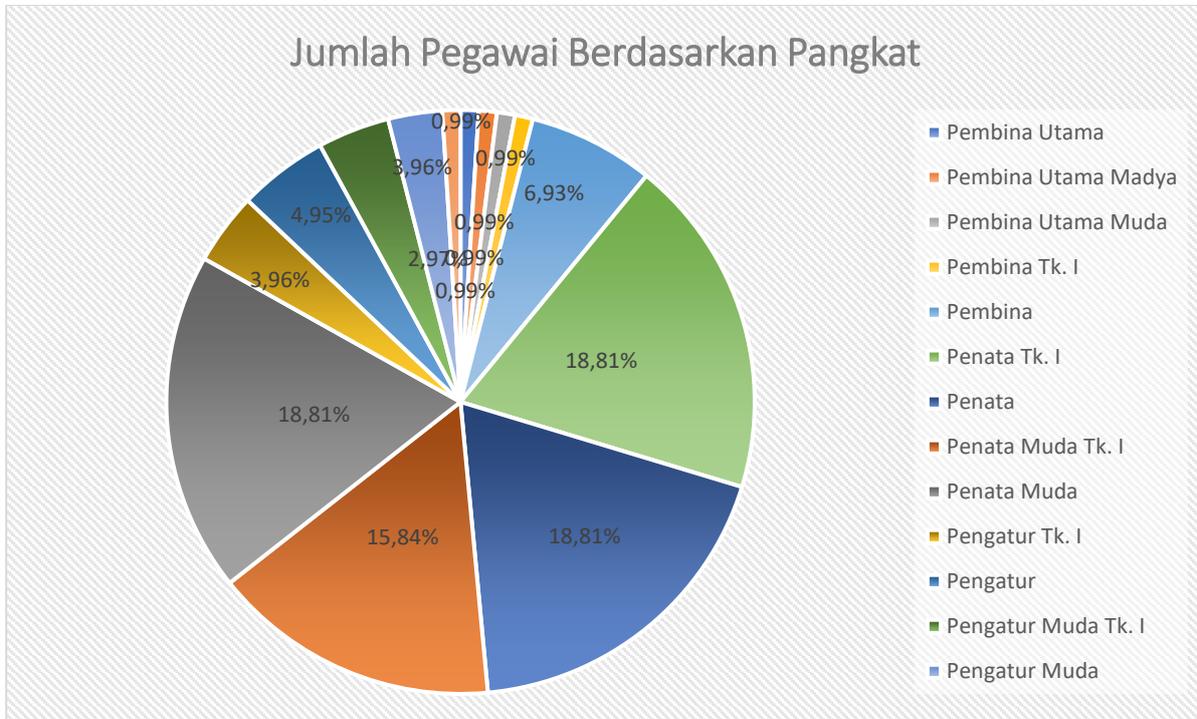
Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 berjumlah 101 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 99 orang pegawai tersebar pada 6 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Program dan Kerjasama berjumlah 29 orang; (ii) Tim Kerja SDM Aparatur berjumlah 13 orang; (iii) Tim Kerja Ortala dan Tata Laksana berjumlah 9 orang; (iv) Tim Kerja Hukum berjumlah 6 orang; (v) Tim Kerja Hubungan Masyarakat berjumlah 9 orang; dan (vi) Tim Kerja Keuangan, BMN dan Umum berjumlah 33 orang.



Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya

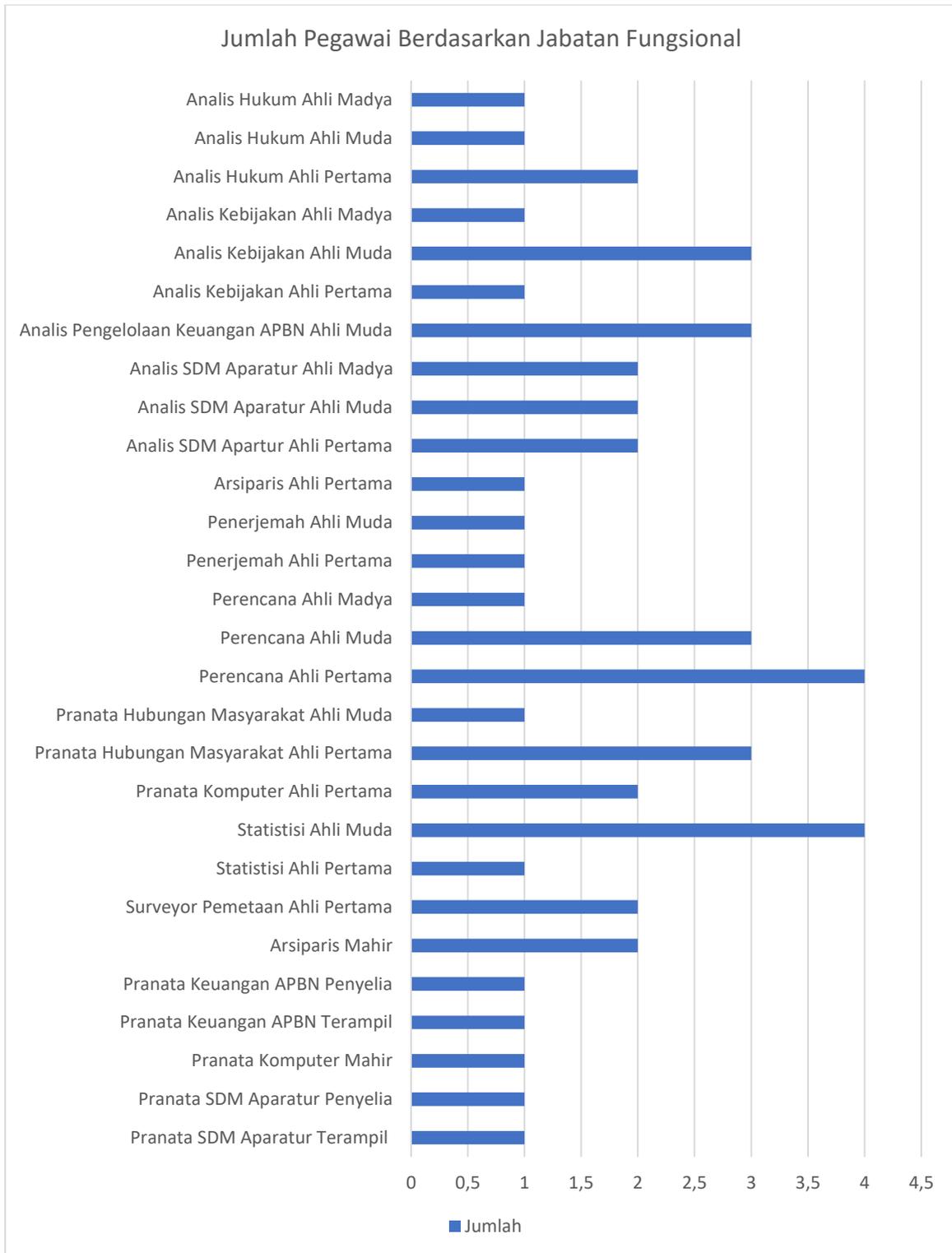
Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama

Madya berjumlah 1 orang; (iii) Pembina Utama Muda berjumlah 1 orang (iv) Pembina Tk. I berjumlah 1 orang; (v) Pembina berjumlah 7 orang; (vi) Penata Tk. I berjumlah 19 orang; (vii) Penata berjumlah 19 orang; (viii) Penata Muda Tk. I berjumlah 16 orang; (ix) Penata Muda berjumlah 19 orang; (x) Pengatur Tk. I berjumlah 4 orang; (xi) Pengatur berjumlah 5 orang; (xii) Pengatur Muda Tk. I berjumlah 4 orang; (xiii) Pengatur Muda berjumlah 3 orang; dan (xiv) Juru berjumlah 1 orang.



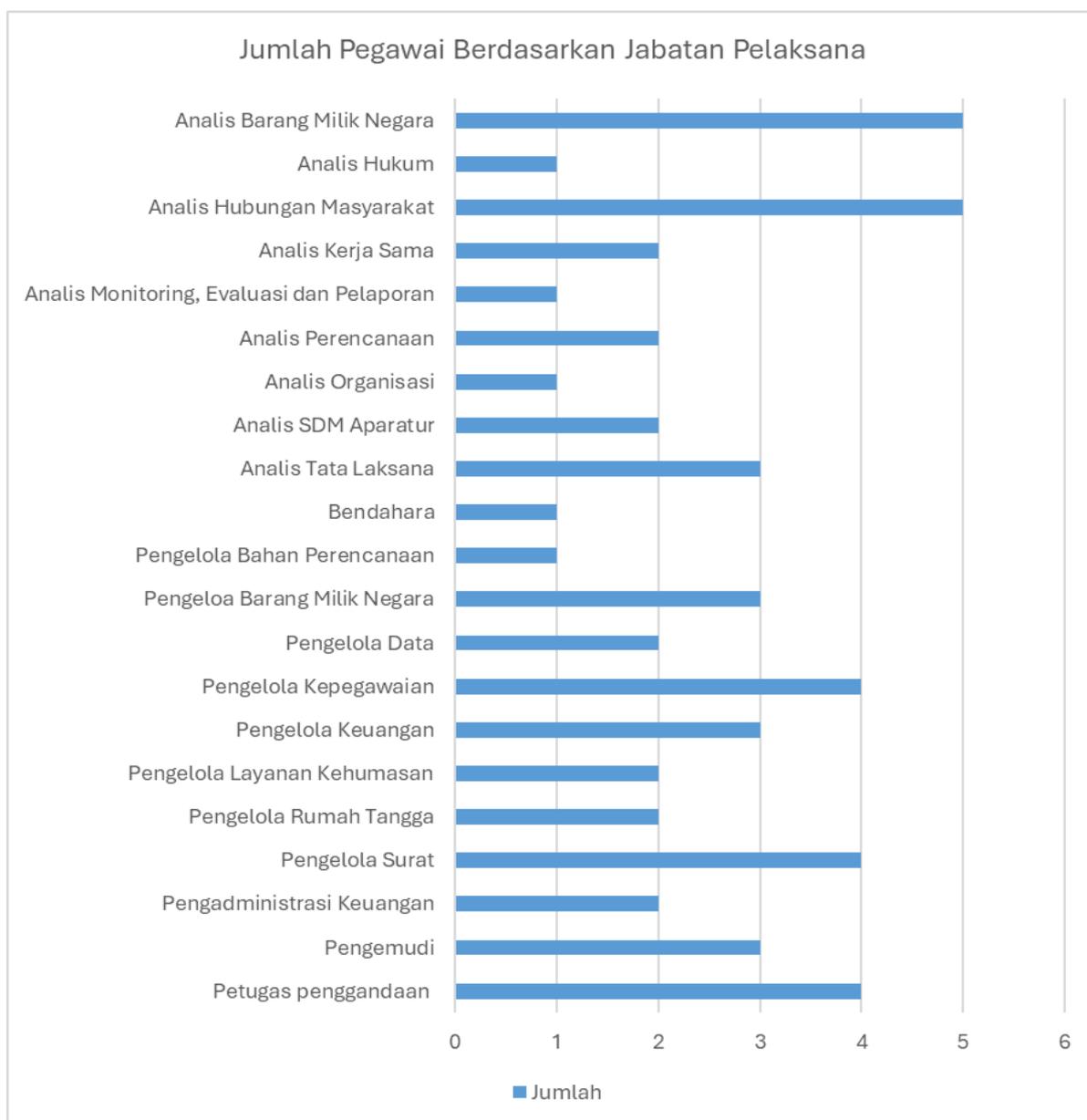
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 49 orang yang terdiri dari Analis Hukum Ahli Madya (1 orang), Analis Hukum Ahli Muda (1 orang), Analis Hukum Ahli Pertama (2 orang), Analis Kebijakan Ahli Madya (1 orang), Analis Kebijakan Ahli Muda (3 orang), Analis Kebijakan Ahli Pertama (1 orang), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (3 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Madya (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Muda (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), Penerjemah Ahli Muda (1 orang), Penerjemah Ahli Pertama (1 orang), Perencana Ahli Madya (1 orang), Perencana Ahli Muda (3 orang), Perencana Ahli Pertama (4 orang), Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 orang), Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (3 orang), Pranata Komputer Ahli Pertama (2 orang), Statistisi Ahli Muda (4 orang), Statistisi Ahli Pertama (1 orang) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Mahir (2 orang) Pranata Keuangan APBN Penyelia (1 orang), Pranata Keuangan APBN Terampil (1 orang), Pranata Komputer Mahir (1 orang), Pranata SDM Aparatur Penyelia (1 orang), Pranata SDM Aparatur Terampil (1 orang).



Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

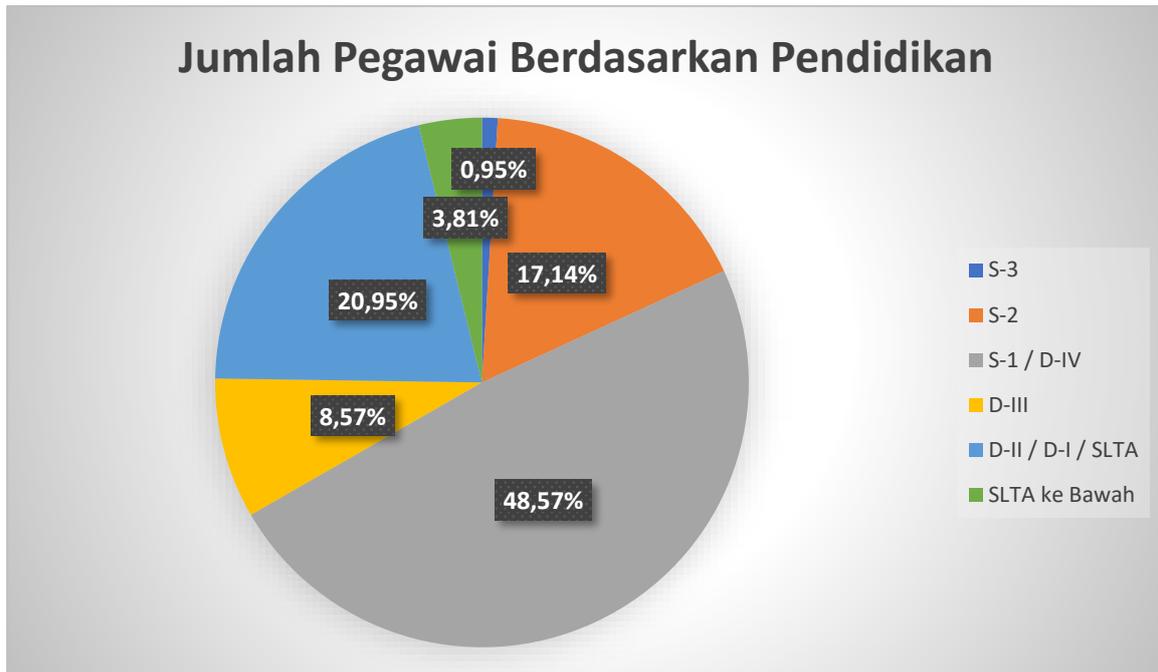
Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 50 orang, terdiri dari Analis Kebijakan (2 orang), Analis Perencanaan (1 orang), Pengelola Bahan Perencanaan (1 orang), Pengolah Data (3 orang), Analis SDM Aparatur (2 orang), Pengelola Kepegawaian (4 orang), Analis Tata laksana (3 orang), Analis Organisasi (1 orang), Analis Hukum (1 orang), Petugas Penggandaan (4 orang), Analis Humas (3 orang), Pengelola Layanan Kehumasan (2 orang), Bendahara (1 orang), Pengelola Keuangan (3 orang), Pengadministrasi Keuangan (2 orang), Analis BMN (5 orang), Pengelola BMN (4 orang), Pengelola Persuratan (3 orang), Pengelola Rumah Tangga (2 orang), dan Pengemudi (3 orang).



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 1 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 18 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 47 orang; (iv)

Lulusan D-3 berjumlah 9 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 22 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 4 orang.



Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budi daya, yang secara umum meliputi perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang dinamis dan kreativitas sumberdaya manusia untuk pengembangan organisasi masih rendah, kurang patuhnya pada beberapa pegawai dalam pengisian SKP sesuai waktu yang ditetapkan; dan
2. Dalam hal keuangan dan layanan umum meliputi dokumen data dukung tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan masih belum lengkap dan dokumen tindaklanjut baru dapat diselesaikan ketika sudah masuk pada triwulan berikutnya sehingga data yang diunggah tidak dapat meningkatkan capaian.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan;
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Sasaran/Indikator Kinerja, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja;
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan;
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang; dan
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025.

Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 hasil revisi dapat dilihat pada gambar berikut ini, sedangkan Perjanjian Kinerja Awal dapat dilihat pada lampiran I.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL dijenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Tinggal Hermawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Nilai SAKIP DJPB (nilai)	84		16. Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (Persen)	95	
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	85		17. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional (Indeks)	77	
	3. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5		18. Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)	3	
	4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	81		19. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Persen)	≥86	
	5. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76		20. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥80	
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92		21. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80	
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,5	Jakarta, 08 April 2025			
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5	Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Pihak Pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya		
	9. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81				
	10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	75	Tb. Haeru Rahayu	Tinggal Hermawan		
	11. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100				
	12. Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	80				
	13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	76				
	14. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	65				
	15. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	77				

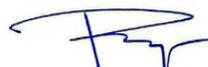
DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	526.244.516.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025		526.244.516.000

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu Tinggal Hermawan

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

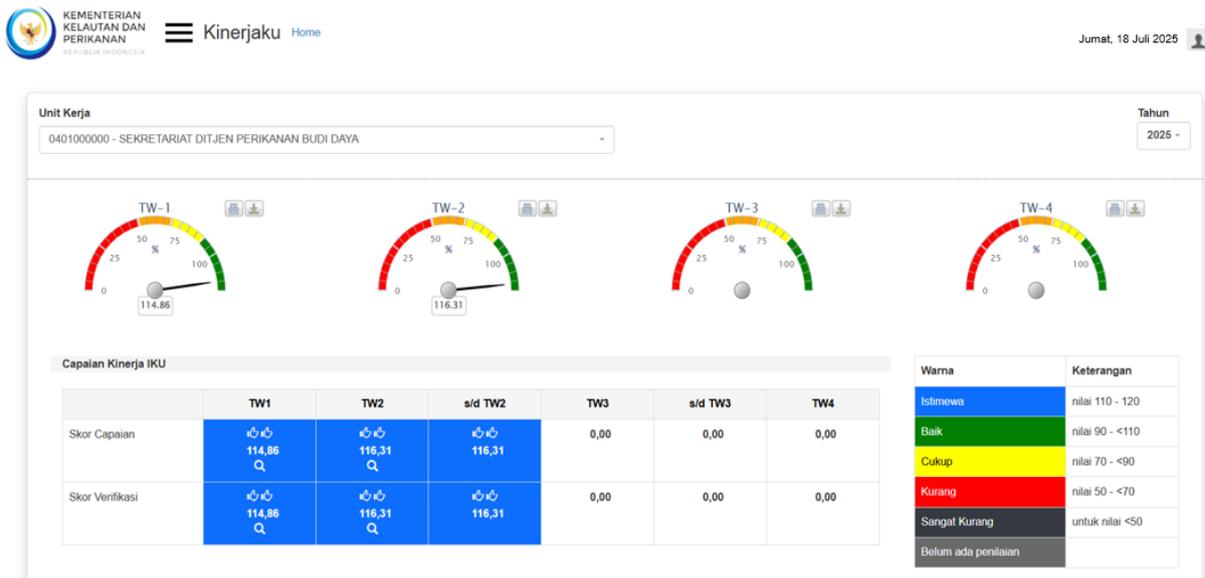
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur

menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard* (BSC) yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau serta biru (untuk indikator yang telah/melebihi target).



Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB Triwulan II Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 116,31 dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 88.543.016.000,- dan telah terealisasi Rp. 17.161.175.322,- atau sebesar 19,38% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai Triwulan II Tahun 2025.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)
1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1 Nilai SAKIP DJPB	84			
	2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	81	74	82,24	111,14
	3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	77			
	4 Indeks Pengelolaan SDM	3			
	5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	100	40	100	250
	6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	95	30	68,75	229,17
	7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral	≥86	86	100	116,28

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)	
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya		dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya				
	8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	<0,5			
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	92	85	97,11	114,25
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	81,5			
	11	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	80			
	12	Persentase Layanan Perkantoran	80			
	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	85	85	94,12	110,73
	14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	3,5			
	15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	81			
	16	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	76			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen	17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	75			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)	
yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	18	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	76	76	99,29	130,65
	19	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	65			
	20	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	77			
	21	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	≥80			

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik merupakan terlaksananya suatu sistem pemerintah dalam mendukung kegiatan yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu terlaksananya kinerja organisasi yang meningkat dan berkembang.

IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 84 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada 1 kegiatan, yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 18,31% dari anggaran sebesar Rp. 697.650.000,- senilai Rp.127.718.500,-.

Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai SAKIP DJPB				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW 2	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	84,30	84				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai SAKIP DJPB								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	-	-	-	-	59,05	84,30	84			

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah melakukan pelatihan SAKIP internal KKP lingkup DJPB dan verifikasi capaian kinerja pada aplikasi Kinerjaku lingkup DJPB dan penyusunan Laporan Kinerja periode triwulan I.

Selama triwulan II terdapat kendala yang terjadi yaitu adanya perubahan nomenkelatur baru yang berdampak pada ketepatan waktu dalam pelaporan dokumen kinerja.

Untuk triwulan selanjutnya akan dilakukan beberapa rencana aksi yaitu:

1. Memastikan penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), serta memanfaatkan secara berkesinambungan; dan
2. Melakukan pelaporan tepat waktu serta melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak.

IKSK.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

1. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

2. Indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah menjadi:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (indeks). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 111,14% dari target triwulan II sebesar 74 (indeks) yang berarti telah memenuhi target.

Bila dibandingkan dengan eselon I lainnya, capaian IP ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya periode triwulan II ini adalah sebesar 82,24 (indeks) dimana nilai yang didapat lebih tinggi dari nilai IP ASN dicapai oleh DJPRL dan BPPSDMKP. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II Lingkup KKP

Nama Es. I	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Keterangan
DJPB	22,08	29,54	25,62	5	82,24	Tinggi
DJPRL	23,30	27,70	25,14	5	81,14	Tinggi
BPPSDMKP	22,39	27,94	25,17	4,99	4,99	Sedang

Dari hasil tersebut didapat bahwa IP ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya mendapatkan kategori tinggi, begitupun dengan DJPRL yang mendapatkan kategori tinggi, sedangkan untuk BPPSDMKP adalah kategori sedang. Kategori tersebut didapat dari kategori Tingkat Profesionalitas ASN yang dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

- a. 91 – 100 = Sangat Tinggi,
- b. 81 – 90 = Tinggi,
- c. 71 – 80 = Sedang,
- d. 61 – 70 = Rendah, dan
- e. 60 ke bawah = Sangat Rendah

Tabel 4. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
80	84,33	81	74	82,24	111,14	101,53

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	-	74,7	85,8	84,41	81	85	81	74	82,24	111,14

Pada periode triwulan II tahun 2025, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Pembinaan kode Etik dan Disiplin ASN pada Bulan Mei di BBPBAP Jepara dan Bulan Juni di BPBAT Mandiangin; dan
2. Penilaian kinerja ASN Triwulan I pada Bulan April 2025, pendokumentasian penilaian kinerja ASN Triwulan I pada Bulan Mei 2025, dan pendokumentasian penilaian kinerja periode final dan konversi PAK bagi pejabat fungsional tahun 2024.

Kendala yang dihadapi pada triwulan II yaitu masih terdapat ASN yang belum membuat konversi PAK sejak tahun 2022.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan menyampaikan kepada pimpinan hasil telaah dan pertimbangan permasalahan permohonan perceraian di BPBAT Mandiangin serta melakukan verifikasi konversi PAK tahun 2024 bagi pejabat fungsional.

IKSK.3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budidaya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Analis Akuakultur, (2) Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Teknisi Akuakultur, dan (4) Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi Jabatan Fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budidaya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukurna statistic yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam Upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (indeks). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan anggaran sebesar Rp.302.612.000,-.

Tabel 5. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	92,31	77				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional									
		Realisasi 2018-2024						2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II	
-	-	-	-	-	85,80	92,31	77				

Kegiatan yang telah dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Telah dilakukan usul pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pembinaan DJPB lingkup DJPB;
2. Pelantikan dalam jabatan fungsional pembinaan DJPB lingkup DJPB pada Bulan Juni sejumlah 2 orang; dan
3. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pembinaan DJPB (Penilaian Kompetensi Potensi dan Situational Judgement Test) pada Bulan Juni 2025.

Untuk periode triwulan II ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam indikator kinerja Indeks Pengelola Jabatan Fungsional.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu membuat rekapitulasi peserta yang lulus uji kompetensi jabatan fungsional pembinaan DJPB

IKSK.4 Indeks Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), (2) proses pengembangan kompetensi ASN, (3) proses mutasi yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpan ASN, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 3 (indeks). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 19,43% dari anggaran sebesar Rp.1.276.972.000,- senilai Rp.248.094.926,-.

Tabel 6. Capaian Indeks Pengelolaan SDM

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	6	3				

Sasaran Strategis	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja	Indeks Pengelolaan SDM										
Realisasi 2018-2024							2025				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II	
-	-	-	-	-	6	6	3				

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 yaitu sosialisasi dan bimbingan administrasi pengelolaan SDM Aparatur pada :

1. Bulan Mei di BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu dan BPBL Lombok; dan
2. Bulan Juni di BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPIUUK Karangasem.

Untuk periode triwulan II, tidak terdapat kendala pada indikator kinerja Indeks Pengelolaan SDM.

Ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Membuat survey terkait dengan minat PNS dalam mengembangkan kompetensi melalui tugas belajar; dan
2. Melakukan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan time-line yang telah ditetapkan oleh BKN.

IKSK.5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yaitu:

1. Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan
2. Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 250% dari target triwulan II sebesar 100 (persen) yang berarti telah memenuhi target sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 14,03% dari anggaran sebesar Rp.357.801.000,- senilai Rp.50.203.300,-.

Tabel 7. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	100	100	40	100	250	100

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya								
Realisasi 2018-2024							2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
87,50	108,33	70	100	100	100	100	100	40	100	250

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Rapat pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Republik Indonesia; dan
2. Telah disampaikan kepada Biro Hukum terkait Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan kendala yang dihadapi pada periode triwulan II yaitu:

1. Pelaksanaan rapat pembahasan kurang intensif (tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten dan berwenang memutuskan); dan
2. Sering terjadi pergantian/perubahan peserta rapat pembahasan sehingga menyebabkan hilangnya kontinuitas dalam proses penyusunan

Untuk triwulan selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu melakukan finalisasi dengan Biro Hukum untuk rapat pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Republik Indonesia.

IKSK.6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Dokumen/naskah kerja sama adalah surat perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang akan bekerja sama. Dokumen ini bisa berupa Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, atau Memorandum of Understanding (MoU). Adapun fungsi dari dokumen/naskah kerja sama adalah (i) untuk menjaga keamanan dan ketenangan semua pihak yang terlibat; (ii) menjamin hak dan kewajiban semua pihak; (iii) mengurangi resiko perselisihan; (iv) menjadi acuan penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan; dan (iv) menjadi bukti konkret untuk pengadilan hukum.

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budidaya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budidaya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Nilai Indikator capaian dari presentase dokumen/naskah kerja sama yang ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah dokumen yang diterima. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan review, pembahasan maupun membuat draft/konsep Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan yang diterima dari unit Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Perikanan Budidaya maupun dari UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan pihak mitra lainnya.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 95 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 229,17% dari target triwulan II sebesar 30% yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 51,72% dari anggaran sebesar Rp.750.072.000,- senilai Rp.387.937.550,-.

Tabel 8. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi	Capaian		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
83,33	127,77	95	30	68,75	229,17	72,37

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti								
Realisasi 2018-2024							2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	89,05	90,26	94,74	100	100	127,77	95	30	68,75	229,17

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, telah dilakukan beberapa tindaklanjut yang dilakukan pada periode triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Membuat draft/konsep Nota Kesepakatan DJPB dengan Provinsi Jabar;
2. Membuat draft/konsep Nota Kesepakatan antara DJPB dengan Kab.Bekasi;
3. Membuat draft/konsep Nota Kesepakatan antara DJPB dengan Kab.Karawang;
4. Membuat draft/konsep Nota Kesepakatan antara DJPB dengan Kab.Subang;
5. Membuat draft/konsep Nota Kesepakatan antara DJPB dengan Kab.Indramayu;
6. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Sukabumi dengan BRIN;
7. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Sukabumi dengan IPB;
8. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Sungai Gelam dengan Madrasah Aliyah Ash-Shiddhqi; dan
9. Review Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Sungai Gelam dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

Kendala yang dihadapi pada triwulan II tahun 2025 pada indikator ini yaitu pembahasan maupun tanggapan/masukan dari mitra kerja sama di lingkup DJPB membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu :

1. Diharapkan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BBP BAT Sukabumi dengan pihak mitra dan Perjanjian Kerja Sama antara BPBAT Sungai Gelam dengan pihak mitra yang telah dilakukan review oleh bagian kerjasama Ditjen Perikanan Budi Daya; dan
2. Melakukan rapat pembahasan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan pihak PT.Telkom.

IKSK.7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Rasio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi pemberitaan terkait topik atau isu tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan menyusun rasio ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai persepsi publik terhadap pemberitaan yang netral dan positif tentang sub sektor perikanan budi daya.

Informasi yang seimbang kepada publik mengenai kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sangat penting untuk mendukung dan mendorong apresiasi

masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah di bidang sektor perikanan budi daya.

Rasio pemberitaan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP. Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budidaya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budidaya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk press release, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun *online*.

Hasil dari publikasi press release yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online tersebut kemudian dilakukan penghitungan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya, dengan menggunakan rumus.

1. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolok ukur yaitu :
 - a. Pemberitaan netral dan positif
 - b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
2. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu:
 - a. Penilaian dilakukan setiap triwulan;
 - b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
 - c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
3. Cara Pengukuran Capaian :
 - a. Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari Biro Humas dan Kerjasama Luar negeri;
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$.
4. Rumus yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} & \textbf{Rasio Jumlah Pemberitaan netral dan Positif} (\%) \\ &= \frac{\text{Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif}}{\text{Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budi daya}} \times 100 \end{aligned}$$

Target yang ditetapkan pada periode tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥ 86 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 116,28% dari target triwulan II sebesar $\geq 86\%$ yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan kegiatan Pengelolaan Konten Publikasi Website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 13,71% dari anggaran sebesar Rp.1.250.010.000,- senilai Rp.171.337.950,-.

Tabel 9. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
100	100	≥ 86	≥ 86	100	116,28	116,28

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya									
Realisasi 2018-2024							2025				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II	
-	-	-	-	-	100	100	≥ 86	≥ 86	100	116,28	

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Sudah berkoordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan pemberitaan netral dan positif di bidang perikanan budi daya; dan
2. Sudah dilakukan pengumpulan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negatif.

Sedangkan kendala yang dihadapi indikator ini adalah dukungan data yang belum optimal untuk menghasilkan materi *press release* dalam rangka meningkatkan publikasi program unggulan sub sektor perikanan budi daya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Mengirimkan Surat kepada Unit Kerja Eselon II serta UPT Lingkup DJPB dalam rangka Permintaan Dukungan Data dan Informasi Untuk Keperluan Publikasi meliputi Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB; dan

- Melakukan publikasi kegiatan DJPB secara masif dengan melakukan penyebarluasan melalui Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB.

IKSK.8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran TA. 2025 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2025 (audit) tidak melebihi <0,5%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah <0,5 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap akhir periode, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 26,11% dari anggaran sebesar Rp.103.691.000,- senilai Rp.27.076.000,-.

Tabel 10. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	100	<0,5				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2018-2024							2025				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II	
-	-	-	-	100	100	100	<0,5				

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 adalah membuat surat Instruksi Dirjen Perikanan Budi Daya atas intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap satker lingkup DJPB untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2024.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat dokumen data dukung tindak lanjut yang tidak sesuai rekomendasi.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melengkapi dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

IKSK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu :

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA,
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 92 (nilai). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 114,25% dari target triwulan II sebesar 85 (nilai) yang berarti telah memenuhi target.

Pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya periode triwulan II ini adalah sebesar 97,11 (nilai) dimana nilai yang didapat lebih rendah dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal senilai 98,67 (nilai), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan senilai 98,34 (nilai), Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan senilai 97,97 (nilai), dan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan senilai 97,59 (nilai). Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.06	19.61	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	96.87		99.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.28	98.44	100.00	100.00	98.08	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.84	19.69	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.14		99.13				100.00				
3	03206	DITJEN Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai	100.00	91.87	95.93	100.00	100.00	100.00	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	19.19	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	95.94		98.98				100.00				
4	03205	DITJEN Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek	94.76		98.64				100.00				
5	03213	BADAN Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
			Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				
6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	81.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.20	100%	0.00	97.20
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.20	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	90.65		100.00				100.00				
7	03204	DITJEN Perikanan Budidaya	Nilai	100.00	83.71	97.99	100.00	100.00	99.52	100.00	97.11	100%	0.00	97.11
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.96	19.60	10.00	10.00	9.95	25.00				
			Nilai Aspek	91.86		99.38				100.00				
8	03203	DITJEN Perikanan Tangkap	Nilai	100.00	80.29	70.13	100.00	100.00	98.09	100.00	90.88	100%	0.00	90.88
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.04	14.03	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	90.15		92.06				100.00				
9	03207	DITJEN Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Nilai	100.00	77.24	70.73	100.00	100.00	99.88	100.00	90.72	100%	0.00	90.72
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.59	14.15	10.00	10.00	9.99	25.00				
			Nilai Aspek	88.62		92.65				100.00				

Gambar 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Lingkup KKP

Rendahnya capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya periode triwulan II ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan dan proyeksi penarikan dana, kurangnya antisipasi terhadap perubahan rencana kegiatan, serta adanya revisi anggaran pada RKAKL yang mengakibatkan nilai yang didapat pada deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran menjadi rendah.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
88,77	93,76	92	85	97,11	114,25	105,55

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	-	95,11	89,07	91,51	86,50	93,76	92	85	97,11	114,25

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu telah dilakukan koordinasi atas perbaikan dua komponen penilaian yang masih dibawah yaitu deviasi halaman III DIPA, dan penyerapan anggaran di lingkup DJPB.

Terdapat kendala dalam indikator ini yaitu kurang cermatnya penanggungjawab kegiatan di lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA.

IKSK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81,5 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan dan Anggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 13,81% dari anggaran sebesar Rp.3.442.230.000,- senilai Rp.475.309.550,-.

Tabel 12. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	86	81,5				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	98,08	71,49	-	95,23	79,52	92,31	81,5			

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 yaitu monitoring dan evaluasi terhadap satker dalam melakukan input Capaian Output secara berkala.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu perubahan revisi anggaran dampak dari pagu anggaran yang diblokir dan *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA, maupun indikator yang membentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan perubahan anggaran;
2. Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu automatic adjustment; dan
3. Memastikan input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya.

IKSK.11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Persuratan dengan capaian pada triwulan II sebesar 61,24% dari anggaran sebesar Rp.200.154.000,- senilai Rp.122.572.800,-.

Tabel 13. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	99,04	80				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	-	-	84,71	92,37	98,32	99,04	81,5			

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

1. Melakukan pendampingan pemenuhan bukti dukung pengawasan kearsipan pada satuan kerja (satker) pusat lingkup DJPB;
2. Memfasilitasi pembinaan pengisian instrumen pengawasan (Form ASKI) kepada unit pengolah pada satker pusat;
3. Memastikan proses pemenuhan bukti dukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan; dan
4. Melaksanakan penilaian pengawasan kearsipan internal tahun 2025 untuk satker pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terdapat kendala pada periode triwulan II yaitu :

1. Terjadinya perubahan format instrumen ASKI oleh ANRI yang berdampak pada ketidaksesuaian dalam penyusunan bukti dukung oleh satker;
2. Belum stabilnya koneksi VPN yang diperlukan dalam mengakses aplikasi persuratan E-Layar, sehingga menghambat proses pelacakan dan pengumpulan bukti kearsipan elektronik;

3. Masih terbatasnya pemahaman pengelola arsip terhadap instrumen penilaian pengawasan kearsipan tahun 2025, yang menyebabkan kualitas pemenuhan data dukung belum optimal.

Pada triwulan selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu :

1. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil penilaian pengawasan kearsipan yang telah dilakukan pada Triwulan II, khususnya pada aspek yang memerlukan perbaikan struktural dan teknis;
2. Memberikan pendampingan intensif kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup DJPB dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan; dan
3. Mengembangkan pola pendampingan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap kondisi masing-masing UPT.

IKSK.12 Persentase Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, serta layanan terkait Barang Milik Negara.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Rumah Tangga dan Layanan BMN dengan capaian pada triwulan II sebesar 36,95% dari anggaran sebesar Rp.416.528.000,- senilai Rp.153.916.404,-.

Tabel 14. Capaian Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Layanan Perkantoran				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	100	80				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Layanan Perkantoran									
Realisasi 2018-2024							2025				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II	
-	-	-	-	100	100	100	80				

Adapun kegiatan yang dilakukan selama periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian indikator ini yaitu :

1. Telah melakukan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pimpinan dan internal melalui penyediaan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, dan layanan pimpinan;
2. Koordinasi operasional kendaraan dinas fungsional maupun operasional guna mendukung mobilitas kegiatan dinas; dan
3. Penatausahaan dan layanan BMN secara berkelanjutan, termasuk pelaksanaan inventarisasi barang, pencatatan pemanfaatan aset, serta dokumentasi dan pengajuan usulan penghapusan dan hibah.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini pada periode triwulan II adalah perubahan mendadak dalam jadwal kegiatan pimpinan dan rapat, yang berdampak pada penyusunan ulang kebutuhan konsumsi dan proses pemutakhiran data BMN terkendala integrasi informasi dari unit terkait, khususnya untuk aset yang digunakan bersama atau berpindah tangan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu :

1. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas layanan perkantoran, termasuk dokumentasi penggunaan kendaraan dan layanan konsumsi;
2. Menyusun template atau sistem pemantauan harian penggunaan kendaraan dan konsumsi; dan
3. Menindaklanjuti hasil inventarisasi BMN dengan penyusunan laporan pemanfaatan dan rencana penertiban dokumen legalitas pemakaian aset.

IKSK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 85 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 110,73% dari target triwulan II sebesar 85% yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana

tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 26,11% dari anggaran sebesar Rp.103.691.000,- senilai Rp.27.076.000,-.

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	64	64	100,00	0	0,00
2	Ditjen Penataan Ruang Laut	153	150	98,04	3	1,96
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	4	4	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	145	134	92,41	11	7,59
5	Ditjen PSDKP	161	161	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budidaya	255	240	94,12	15	5,88
7	BPPSDMKP	236	222	94,07	14	5,93
8	Ditjen PDSPKP	122	117	95,90	5	4,10
9	BPPMHKP	123	117	95,12	6	4,88
10	Itjen	5	5	100,00	0	0,00
TOTAL		1268	1214	95,74	54	4,26

Gambar 9. Perbandingan Capaian Indikator Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Dari gambar perbandingan di atas didapat bahwa, capaian nilai presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 94,12%, dimana hasil tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan eselon I lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan karena dari jumlah total rekomendasi sebanyak 255, hanya 240 saja yang baru ditindaklanjuti, sehingga masih tersisa sebanyak 15 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 5,88%.

Tabel 15. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
86,27	93,94	85	85	94,12	110,73	110,73

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya								
Realisasi 2018-2024							2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	74,32	70,41	67,21	89,86	89,15	93,94	85	85	94,12	110,73

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal secara bertahap guna tercapainya IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (%).

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada periode triwulan II Tahun 2025 adalah beberapa dokumen penyelesaian tindak lanjut baru diupload ketika penilaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (%) triwulan II telah selesai dilaksanakan pemantauan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan mengingatkan operator Satker untuk mengupload dokumen tindak lanjut sebelum berakhirnya waktu perhitungan capaian IKU.

IKSK.14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan

pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 3,5 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 16. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-	3,57	3,5				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	-	-	-	-	-	3,57	3,5			

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah ditandatangani SK Satgas SPIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 dan menyampaikan pelaporan SPIP menggunakan Aplikasi SILASTRI.

Kendala dalam yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu:

1. Belum ada surat tugas BPKP untuk melakukan Penilaian Maturitas SPIP lingkup KKP tahun 2025;
2. Pemenuhan dokumen pada penilaian mandiri maturitas yang masih tidak tepat waktu; dan
3. Perlunya adaptasi peng-input-an pada aplikasi penilaian Maturitas BPKP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Menyampaikan SK TIM ASESOR Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
2. Meningkatkan nilai Maturitas yang telah diperoleh; dan
3. Berkoordinasi dengan Inspektoat Mitra serta Biro Perencanaan terhadap penilaian Maturitas selanjutnya.

IKSK.15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 31,05% dari anggaran sebesar Rp.593.879.000,- senilai Rp.184.407.350,-.

Tabel 17. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-		81				

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 yaitu :

1. Telah dilakukan Sosialisasi Aplikasi Bantuan Pemerintah dengan Tenaga Ahli DPR RI; dan
2. Monitoring progress program prioritas/strategis pada tahun berjalan maupun tahun yang lalu.

Sedangkan kendala yang dihadapi pada periode triwulan II adalah karena adanya blokir anggaran sehingga pelaksanaan program prioritas belum bisa terlaksana dengan optimal, seperti halnya dalam melakukan CPCL terkendala biaya karena tidak adanya anggaran dan untuk Aplikasi Bantuan Pemerintah masih perlu adanya perbaikan dikarenakan tidak dapat memverifikasi hasil dari pengajuan Bantuan Pemerintah yang telah diajukan oleh produsen data.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan monitoring progress program prioritas/strategis secara berkala dan melakukan verifikasi pada pengajuan Bantuan Pemerintah yang diajukan pada Aplikasi Bantuan Pemerintah secara berkala.

IKSK.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Pembangunan integritas adalah proses membangun dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran dalam diri individu, kelompok, atau organisasi. Hal ini mencakup pengembangan karakter yang konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan, serta penerapannya dalam tindakan sehari-hari.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan terkait pembangunan integritas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah memperkuat integritas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di KKP untuk menerapkan langkah-langkah konkret dalam mencegah praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Indikator Kinerja Pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diukur melalui 6 (enam) indikator penilaian yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas;
2. Pengendalian Gratifikasi;
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS;
4. Pengelolaan Konflik Kepentingan;
5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan
6. Pengendalian Kecurangan.

Masing-masing indikator penilaian tersebut terdiri dari sub indikator penilaian yang menggambarkan proses atau kegiatan yang mendukung terlaksananya indikator utama. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang terpenuhi dari masing-masing sub indikator penilaian.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 18. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-		76				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Dirjen PB Nomor 248 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025;
2. Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Dirjen PB Nomor 247 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025; dan
3. Melakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup DJPB dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 291 Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan SOTK DJPB.

Belum ditemukan kendala dalam pencapaian IKU ini pada periode triwulan II tahun 2025. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memastikan pemenuhan data dukung disusun tepat waktu dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan dokumen data dukung.

IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Ditjen Perikanan Budi Daya adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di Ditjen Perikanan Budi Daya sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Analisis, Verifikasi, Validasi dan Supervisi Data Perikanan Budidaya dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 13,39% dari anggaran sebesar Rp.1.493.641.000,- senilai Rp.199.934.050,-.

Tabel 19. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-		75				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

1. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan PUSDATIN untuk memastikan bahwa aplikasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengolahan data oleh enumerator dan validator sehingga untuk input data KUSUKA dan data produksi;
2. Hasil koordinasi dengan pusat penyuluha KKP bahwa enumerator masih mengalami kendala dalam penginputan data baik KUSUKA maupun data produksi permasalahan ini timbul karena ada user enumerator yang belum di mutakhirkan lokasi wilayah kerjanya dan sebagian lagi masih belum mengerti langkah operasionalnya ;
3. SK enumerator sudah dimutakhirkan berdasarkan usulan dari kabupaten dan kota; dan
4. Pelatihan dan sosialisasi masih diperlukan oleh enumerator dan validator ntuk memastikan aplikasi dapat digunakan tanpa ada kendala .

Adapun kendala yang muncul pada triwulan II ini, yaitu:

1. Koordinasi dengan validator tidak bisa dilaksanakan seoptimal mungkin karena kegiatan hanya bisa dilakukan secara daring; dan
2. Koordinasi terkait aplikasi satudata masih harus terus dilakukan karena masih terdapat kesalahan kesalahan minor dalam aplikasi baik data KUSUKA maupun data produksi.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya diantaranya yakni:

1. Mengevaluasi kinerja enumerator agar dapat lebih optimal dalam melakukan pengumpulan dan penginputan data;
2. Mencairkan biaya operasional pengolahan data semester satu sebagai motivator bagi enumerator agar bekerja lebih baik lagi kedepannya; dan
3. Melakukan kegiatan percepatan pendataan KUSUKA untuk beberapa kabupaten sentra yang capaian KUSUKANYA masih minim.

IKSK.18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan dan kepatuhan Ditjen Perikanan Budi Daya dalam perencanaan pengadaan barang/jasa melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada platform Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta [PERPRES No. 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP secara lengkap dan tepat waktu menjadi fondasi dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya.

Adapun perhitungan capaian IKU ini adalah Persentase Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dibanding Pagu Pengadaan Barang/Jasa. Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 130,64% dari target triwulan II sebesar 76% yang berarti telah memenuhi target.

Bila dibandingkan dengan eselon I lainnya, nilai capaian Presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya pada periode triwulan II ini sebesar 99,29%, dimana hasil tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan eselon I lainnya yang mendapatkan capaian 100%, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan

Perikanan. Perbandingan capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar tabel dibawah ini.

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Gambar 10. Perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II Lingkup KKP

Nilai capaian tersebut didapat disebabkan karena nilai pagu terumumkan senilai Rp.1.029.924.292.069,- lebih tinggi dibandingkan dengan pagu pengadaan senilai Rp.1.022.674.212.069,-, sehingga adanya selisih lebih terumumkan sebesar Rp.7.250.080.000,- yang mengakibatkan nilai pagu terumumkan melebihi target dari pagu pengadaan.

Tabel 20. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025		% Capaian		
Realisasi		Target		Capaian		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW 1 2025	terhadap target Tahun 2025
-		76	76	99,29	130,64	130,64

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah melakukan kegiatan penyusunan RUP SIRUP lingkup DJPB dan monitoring penginputan RUP pada SIRUP dan melakukan monitoring penginputan RUP pada SIRUP.

Kendala yang dihadapi yaitu adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan RUP dan operator SIRUP baru yang perlu sosialisasi lebih lanjut karena belum sepenuhnya memahami ketentuan teknis penginputan RUP di SIRUP, seperti pengelompokan jenis pengadaan, pemilihan metode pemilihan, dan estimasi nilai paket yang perlu sosialisasi lebih lanjut.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan monitoring penginputan RUP triwulan II pada SIRUP, mengadakan kegiatan penyusunan RUP pada SIRUP triwulan II lingkup DJPB dan melakukan pembinaan pada operator SIRUP.

IKSK.19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses bisnis di lingkungan KKP agar lebih efisien, efektif, dan terintegrasi.

Proses Bisnis Kementerian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian yang terdiri atas proses inti, proses pendukung dan proses lainnya. Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal;
2. Proses Bisnis level 1 dan level 2. Proses Bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 0, sedangkan Proses Bisnis level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 1 (proses inti dan proses pendukung). Proses Bisnis level 1 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon I dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya sedangkan Proses Bisnis level 2 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon II; dan
3. Proses Bisnis level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada pada Proses Bisnis level 1 (proses lainnya) dan level 2. Proses Bisnis ini menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi lingkup DJPB dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 9,44% dari anggaran sebesar Rp.235.655.000,- senilai Rp.22.257.452,-.

Tabel 21. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-		65				

Adapun kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu menghadiri undangan rapat dari Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi melalui Nota Dinas Nomor 727/SJ.3/OT.310/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 perihal Percepatan Penyelesaian Uraian Fungsi, Proses Bisnis, dan Standar Operasional Prosedur.

Karena pada triwulan I tahun 2025 terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja DJPB sehingga perlu dilakukan review kembali terhadap draft peta proses bisnis DJPB yang telah disusun sebelumnya. Hal ini belum dapat dilakukan pada triwulan II tahun 2025 karena kegiatan organisasi berfokus pada penyusunan uraian tugas dan fungsi dan penataan UPT lingkup DJPB.

Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan pembahasan kembali terhadap draft peta proses bisnis DJPB yang telah disusun menyesuaikan dengan SOTK DJPB saat ini.

IKSK.20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program

baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 22. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis							Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya						
Indikator Kinerja							Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya						
2024			2025				% Capaian						
Realisasi			Target		Realisasi		Capaian						
TW II	Tahun 2024		Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025						
-			77										

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu :

1. Telah disusun Draft Tim Penilai Inovasi lingkup DJPB Tahun 2025 dan disampaikan kepada Timja Hukum untuk diproses lebih lanjut melalui Memorandum Nomor 1055/DJPB.1/TU.210/IV/2025 Tanggal 24 April 2025;
2. Telah dibentuk Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Dirjen PB Nomor 245 tahun 2025 tanggal 28 April Tahun 2025;
3. Menghadiri Undangan Rapat Agenda Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KIPP tahun 2025 oleh Kepala Pusdatin melalui Nota Dinas Nomor 1224/SJ.8/TU.210/IV/2025 tanggal 22 April 2025;
4. Telah dilaksanakan Sosialisasi Lembar kerja penilaian proposal inovasi pelayanan publik KIPP KKP 2025 lingkup DJPB melalui undangan nomor B.2846/DJPB.1/TU.210/V/2025 tanggal 7 Mei 2025;
5. Telah dilaksanakan Rapat Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPB tahun 2025 melalui Undangan Nomor B.2971/DJPB.1/TU.330/V/2025 tanggal 15 Mei 2025;

6. Telah dilakukan penilaian usulan proposal inovasi oleh Tim Penilai Inovasi DJPB ditetapkan dengan Berita Acara Nomor B.3027/DJPB.1/OT.710/V/2025 Tanggal 18 Mei 2025; dan
7. Telah diusulkan 5 Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup DJPB tahun 2025 kepada Tim Penilai Inovasi KKP melalui Nota Dinas Sesditjen PB Nomor 1300/DJPB.1/OT.710/V/2025 Tanggal 20 Mei 2025.

Tidak ada kendala signifikan dalam pencapaian target IKU ini di triwulan II tahun 2025. Untuk mendukung rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah :

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin KKP untuk memperoleh hasil penilaian KIPP KKP tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025;
2. Berkoordinasi dengan BPKIL Serang dan BPBAT Sungai Gelam untuk melakukan input proposal inovasi pelayanan publik pada aplikasi Sinovik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh KemenPANRB) tepat waktu.

IKSK.21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Perhitungan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) dihitung dalam kurun periode 1 (satu) tahun, dinilai oleh Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen KKP. Cara mengukur capaian tersebut dengan berdasarkan bobot penilaian monev terdiri atas pengisian SAQ PPID dan Presentasi. Indikator dan bobot SAQ PPID diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Media Publikasi baik melalui konten video dan konten infografis yang dipublish di media sosial dan website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Publikasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Tim PPID Sekretariat Perikanan Budi Daya dengan capaian kategori informatif.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥ 80 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 23. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target	Realisasi		Capaian	
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2025	terhadap target Tahun 2025
-		≥ 80				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

1. Telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama layanan keterbukaan informasi publik lingkup DJPB;
2. Telah diusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup DJPB kepada PPID KKP;
3. Telah disampaikan usulan Tim Teknis Layanan Informasi Publik KKP Tahun 2025 dari DJPB, melakukan presentasi uji publik untuk penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2024; dan
4. Telah dilakukan pembaharuan informasi publik di website dan media sosial DJPB, melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kendala yang dihadapi yaitu koneksi ke website sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi publik masih memerlukan koneksi melalui VPN yang masih belum stabil dan kadang terputus sehingga menghambat proses upload konten web.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Akan Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup DJPB, setelah penetapan DIK dari PPID KKP;
2. Melakukan pembaharuan informasi publik di website dan media sosial DJPB;
3. Melakukan pembaharuan Komitmen Bersama dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik lingkup DJPB;
4. Melakukan pelayanan informasi publik kepada Masyarakat; dan
5. Melakukan penyiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik lingkup KKP

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp.88.543.016.000,- dan telah terealisasi Rp.17.161.175.322,- atau sebesar 19,38% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase realisasi belanja sebesar 2,29% dari capaian Triwulan II tahun 2024 sebesar 21,67%. Hal tersebut terjadi diakibatkan karena adanya efisiensi anggaran.

OM-SPAN SETDITJEN PERIK... T.A. 2025

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

FILTER: KODE KEGIATAN | 2348 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA PERIODE | APRIL S.D. JUNI

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	47,998,503,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	88,543,016,000
		REALISASI	12,322,384,943 (25.67%)	4,838,790,379 (12.27%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	17,161,175,322 (19.38%)
		SISA	35,676,118,057	34,605,722,621	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	71,381,840,678
GRAND TOTAL		PAGU	47,998,503,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	88,543,016,000
		REALISASI	12,322,384,943 (25.67%)	4,838,790,379 (12.27%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	17,161,175,322 (19.38%)
		SISA	35,676,118,057	34,605,722,621	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	71,381,840,678

Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025

OM-SPAN SETDITJEN PERIK... T.A. 2024

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

FILTER: KODE KEGIATAN | 2348 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA PERIODE | APRIL S.D. JUNI

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	41,004,842,000	60,610,581,000	1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	103,365,423,000
		REALISASI	11,969,928,060 (29.19%)	10,091,298,308 (16.65%)	342,914,400 (19.60%)	0	0	0	0	0	0	0	22,404,140,768 (21.67%)
		SISA	29,034,913,940	50,519,282,692	1,407,085,600	0	0	0	0	0	0	0	80,961,282,232
GRAND TOTAL		PAGU	41,004,842,000	60,610,581,000	1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	103,365,423,000
		REALISASI	11,969,928,060 (29.19%)	10,091,298,308 (16.65%)	342,914,400 (19.60%)	0	0	0	0	0	0	0	22,404,140,768 (21.67%)
		SISA	29,034,913,940	50,519,282,692	1,407,085,600	0	0	0	0	0	0	0	80,961,282,232

Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp. 88.543.016.000,- dan telah terealisasi Rp. 17.161.175.322,- atau sebesar 19,38% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan).
2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2025 adalah Istimewa (sangat baik) yakni sebesar 116,31 (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerja KKP). Dari hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun 2025, 7 Indikator Kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan sisanya 14 Indikator Kinerja dihitung pencapaiannya secara tahunan dan semesteran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2025 adalah Istimewa (sangat baik), hal ini terlihat dari capaian pada 7 indikator kinerja untuk triwulan II sudah mencapai atau melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2025 dengan nilai pencapaian NPSS sebesar 116,31% . Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum terdapat capaiannya untuk tetap bekerja keras agar bisa mencapai/melebihi target yang ditetapkan pada perhitungan periode yang sudah ditetapkan yaitu semesteran atau tahunan.

4.2 Rekomendasi

Untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terhadap capaian kinerja secara berkala; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik triwulanan, semesteran dan tahunan.

LAMPIRAN

Lampiran I : 1-4

Hal : Perjanjian Kinerja Awal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Nilai SAKIP DJPB (nilai)	84
		2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	85
		3.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5
		4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	81
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81
		10.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	75
		11.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
		12.	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	65
		15.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	77

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (Persen)	95
		17. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional (Indeks)	77
		18. Indeksi Pengelolaan SDM (Indeks)	3
		19. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Persen)	≥86
		20. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥80
		21. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	526.244.516.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025		526.244.516.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025**